

# Moderasi Beragama: Cara Pandang Moderat Mengamalkan Ajaran Agama di Indonesia dalam Perspektif Fenomenologi Agama

Oskar Gultom

Mahasiswa Pascasarjana STFT Widya Sasana, Malang, Indonesia

E-mail: [oskargultom@gmail.com](mailto:oskargultom@gmail.com)

---

## Abstract

Religious moderation becomes a perspective, attitude, and behavior that always takes a middle position, acts fairly, and is not extreme in religion. The purpose of this paper is to find out religious moderation as a way of practicing religious teachings in Indonesia. The study uses the perspective of a phenomenology of religion. How the application of religious teachings is practiced with a moderate perspective to be able to coexist peacefully with other religions so as not to create clashes that can hurt other people who do not share our views and understanding and how the Catholic Church responds to religious moderation in Indonesia. The understanding and behavior of religious moderation offered are expected to be a solution to the problems currently faced by the Indonesian people related to religious issues. The research method used is qualitative approach by conducting a literature study.

**Keywords:** religious moderation, viewpoints, moderate, Catholic Church.

---

## Abstrak

Moderasi beragama menjadi suatu cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui moderasi beragama sebagai cara pandang mengamalkan ajaran agama di Indonesia dalam perpektif fenomenologi agama. Bagaimana penerapan ajaran agama diamalkan dengan cara pandang moderat untuk dapat hidup berdampingan secara damai dengan agama-agama lain sehingga tidak menciptakan benturan-benturan yang dapat menyakiti orang lain yang tidak sehaluan dan sepemahaman dengan kita dan bagaimana Gereja Katolik menyikapi terkait dengan moderasi beragama di Indonesia. Pemahaman dan perilaku moderasi beragama yang ditawarkan diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia terkait dengan isu agama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan.

**Kata-kata kunci:** Moderasi Beragama, Cara Pandang, Moderat, Gereja Katolik.

## 1. Pengantar

Sebagai makhluk mulia ciptaan Allah, agama hadir untuk menjaga martabat manusia. Kehadiran setiap agama membawa misi damai dan keselamatan bagi setiap penganutnya. Karena itu hidup beragama harus selalu berlandaskan keyakinan kepada Tuhan yang Mahakuasa. Untuk mencapai itu agama menghadirkan ajaran tentang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan.

Masyarakat Indonesia memiliki begitu banyak keragaman yang mencakup etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keragaman bisa menjadi pemicu terjadinya benturan antar budaya, ras, etnik, agama dan nilai-nilai hidup. Dalam komunikasi horizontal antarmasyarakat, benturan antarsuku dan agama masih sering terjadi di berbagai wilayah, mulai dari menciptakan prasangka-prasangka buruk antarsuku dan agama, diskriminasi, hingga ke konflik terbuka yang memakan korban jiwa akibat pembunuhan secara kejam (Zainuddin 2020, 4). Dalam masyarakat multikultural, interaksi sesama manusia memiliki pengaruh yang cukup tinggi, sehingga kemampuan bersosialisasi masyarakat dalam berinteraksi antarmanusia perlu dimiliki setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu moderasi beragama dapat menjadi tolak ukur dari kehidupan beragama untuk menghindari benturan yang dapat melukai sesama.

Ada beberapa fakta yang sulit dihindari tentang bagaimana eksistensi agama-agama di Indonesia. Ditambah lagi hubungan antara agama dan negara yang sekaligus masyarakat pada umumnya menanggapi relasi-relasi itu sebagai kenyataan sosial. Dari sini dapat dikatakan bahwa untuk menemukan solusi dari fakta-fakta itu tidak mudah. Persoalan itu masih menjadi bahan pembahasan yang selalu relevan, karena selalu ada agama-agama/keyakinan yang merasa “dipinggirkan” keberadaannya. Menemukan solusi atas persoalan-persoalan tersebut tidak akan pernah berhenti. Hal ini disebabkan oleh tantangan dan kendala yang selalu muncul saat mencari titik temu di antara agama-agama yang berada di negara ini. Dalam konteks interaksi sosialnya, harus diakui keberadaan agama-agama bukan hanya menjadi pemersatu dalam masyarakat tetapi agama juga bisa menjadi pencetus masalah yang dapat memecah-belah umat manusia. Hal ini tampak ketika manusia beragama itu cenderung untuk mengidentifikasi diri sebagai bagian dari suatu kelompok agama tertentu dan yang bukan sepaham dengannya menjadi orang di luar kelompoknya (Haryani 2020, 148).

Moderasi beragama menjadi suatu cara pandang, sikap, dan perilaku yang mengambil posisi di tengah-tengah, bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama (Zainuddin 2020). Moderasi beragama dipahami sebagai sikap

beragama yang seimbang antara pengamalan agama itu sendiri dan penghormatan terhadap praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Cara pandang, sikap dan perilaku umat beragama yang seimbang ini menjadi cerminan dalam mewujudkan komitmen hidup berbangsa dan bernegara. Komitmen ini ditandai dengan adanya rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia.

Pada dasarnya agama tidak mengajarkan dan menghendaki adanya bentuk intoleransi, fanatisme, ekstremisme, dan fundamentalisme yang dapat membahayakan dan merongrong bangsanya. Tetapi tidak jarang terdapat cara pandang, sikap dan perilaku serta tindakan hadir untuk memecah-belah komitmen kebangsaan. (Hariyanto 2021) Pemahaman terhadap ajaran dan ideologi yang keliru menganggap agamanya lebih benar dari agama lain sehingga berusaha untuk mengancam kebebasan beragama, melakukan aksi atau tindakan bom bunuh diri, membakar atau merusak rumah ibadat, melarang mendirikan rumah ibadat dan lain-lain sebagainya Hal ini menjadi sikap yang bertentangan dengan moderasi beragama, karena bentuk-bentuk ini telah mengancam jiwa dan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, melalui kekerasan yang dilakukan oleh kelompok dan golongan tertentu dengan mengatasnamakan agama.

Gereja Katolik melalui ajaran-ajarannya menekankan pentingnya cara pandang, sikap, perilaku dan cara bertindak mencerminkan moderasi beragama yang berorientasi pada komitmen kebangsaan. Hal ini dapat ditemukan dalam pernyataan-pernyataan Magisterium Gereja, Nota Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Surat Gambala Keuskupan. Gereja Katolik terlibat secara langsung dalam mendukung penguatan moderasi beragama dan mewujudkan komitmen kebangsaan, baik melalui para tokoh Gereja dan umat Katolik sendiri yang terlibat secara eksternal dalam forum kebangsaan dan ideologi, forum komunikasi umat beragama, melalui lembaga ataupun organisasi lainnya yang terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan yang diselenggarakan. (D 2020)

## **2. Agama dan Problem Identitas**

Pembahasan agama disini tidak menekankan tentang definisi terminologi dari agama itu sendiri, tapi melihat bagaimana agama mengkontekstualisasikan pemahaman nilai-nilainya. Artinya, bagaimana sesungguhnya agama-agama yang ada ditempatkan dalam kehidupan umat beragama oleh para pemeluknya, termasuk termasuk di dalamnya tentang bagaimana pemaknaan agama secara

bersama-sama (Sermada 2021, 93). Mayoritas warga masyarakat Indonesia mengakui hanya ada enam agama yang layak hidup, mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Proses sosialisasi realitas agama resmi ini terjadi terus-menerus sejak ditetapkan dalam undang-undang, sehingga masyarakat menganggapnya sebagai penerimaan apa adanya tanpa kritisisme (Ibid, 93-94). Masing-masing dari para pemeluk agama resmi itu berkeyakinan bahwa agama mereka lah yang memiliki kebenaran dan layak untuk disebut agama, di luar dari agama mereka menjadi “rival” yang hidup sebagai bagian dari masyarakat yang dalam aspek tertentu dapat dimanfaatkan atau meraup keuntungan dari mereka (Riyanto 2010, 408–409).

Secara historis Islam menjadi mayoritas di Indonesia. Kecendrungan yang tampak dari agama besar itu adalah persyaratan bagi setiap agama di Indonesia harus memiliki keyakinan kepada “Tuhan Yang Maha Esa”. Hal ini terkesan menjadikan agama yang tidak memiliki ajaran tentang Tuhan Yang Maha Esa seakan tidak mendapatkan pengakuan dari negara maupun masyarakat. Apalagi jika pengertian agama harus dikaitkan dengan adanya konsep tentang Tuhan Yang Maha Esa, Nabi dan Kitab Suci, maka agama seperti Hindu dan Budha akan sulit memenuhi kriteria ini. Meskipun kedua agama itu termasuk bagian dari agama yang disebutkan dalam aturan perundang-undangan dengan pertimbangan aspek sosiologis karena kedua agama ini termasuk memiliki cukup banyak penganut dalam masyarakat. Pertimbangan aspek akademik tidak hanya menjadi sumber definisi agama, aspek sosio-politik juga menjadi aspek dominan yang mempengaruhinya (Sermada 2021, 101–102).

Peran agama terhadap segenap penganutnya, tidak terkecuali agama lokal/pribumi, selalu mengikat setiap orang dalam suatu ikatan yang sangat kuat dengan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang. Yang dimaksud perlakuan sama yaitu, membiarkan para penganutnya untuk mengembangkan dan melestarikan ajarannya tanpa memaksa mereka harus memiliki kesamaan dengan yang lainnya. Mereka juga berhak mendapatkan pengakuan sebagai agama dan dilindungi secara hukum dan disetarakan dengan agama-agama besar lainnya. Sederhananya dapat dikatakan bahwa negara dan masyarakat tidak akan dirugikan baik sosial, politik, budaya dengan eksistensinya sebagai bagian dari “definisi agama” (Hariyanto 2021). Agama memiliki kekuatan yang dapat menggerakkan motivasi pemeluknya untuk melakukan kegiatan yang di luar akal, seperti tindakan untuk menyakiti diri sendiri, juga memiliki aspek fungsional lain yang menguntungkan penganutnya. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah dengan menjadikan agama sebagai sarana politik oleh penganutnya. Di beberapa negara, termasuk di Indonesia, menjadi bukti bahwa

keterlibatan agama masih cukup memiliki pengaruh dalam berpolitik dengan membentuk organisasi atau partai yang berbasis agama tertentu.

Agama juga memberikan pengaruh terhadap kreativitas dan kebebasan manusia yang diakibatkan doktrin-doktrinnya yang sangat ketat dan tidak memberikan ruang untuk berpikir kritis (Sermada 2021, 94). Berangkat dari hal itu, agama memegang kendali pada aturan-aturan kehidupan, juga sesekali mengambil peran kuasa, dari aspek sosial hingga pada aspek personal. Di saat itu, hukum agama menjadi satu-satunya pedoman tertinggi yang tidak dapat ditandingi dari segala aspek. Kasus yang terjadi adalah politisasi agama dan pemanfaatan agama untuk meleagalkan kekuasaan dalam berbangsa dan bernegara. Pengaruhnya yaitu memunculkan keterlibatan negara dalam urusan agama dan keberagamaan para penganutnya.

Negara-negara yang multi agama seperti Indonesia, memiliki kecenderungan keberpihakan hanya pada agama-agama tertentu. Hal ini menjadi fenomena yang sudah biasa terjadi di beberapa negara, meskipun selalu ada perlawanan dari agama-agama yang merasa dipinggirkan. Pada akhirnya, konfrontasi antar pemeluk agama menimbulkan konflik yang tidak dapat dihindari. Singkatnya, kekerasan demi kekerasan yang dilakukan atas nama agama mengharuskan agama minoritas mengalah untuk menghindari kepunahan.

### **3. Moderasi dan Keberagamaan**

Dalam masyarakat Indonesia yang multi budaya, sikap eksklusif keberagamaan hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak. Hal ini kemudian memicu perlawanan antar kelompok agama. Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia, umumnya timbul akibat adanya sikap keberagamaan yang eksklusif, serta persaingan antarkelompok agama untuk mendapatkan dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran, karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang atas sebuah persaingan (Riyanto 2018, 413). Konflik kemasyarakatan dan pemicu ketidakselarasan masyarakat yang pernah terjadi dimasa lalu berasal dari kelompok ekstrim kiri (komunisme) dan ekstrim kanan (Islamisme). Akan tetapi pada saat ini ancaman ketidaksesuaian kadang berasal dari globalisasi dan Islamisme, yang disebutnya sebagai dua fundamentalisme: pasar dan agama.

Menghindari ketidakselarasan itu, maka perlu ditumbuhkan pola beragama yang moderat dan sikap keterbukaan dalam beragama, yang disebut sikap moderasi beragama (Zainuddin 2020, 42). Moderasi berarti moderat, lawan dari kata ekstrem atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Moderasi beragama adalah jalan tengah dalam menghidupi keberagaman agama

di Indonesia. Moderasi dan budaya Nusantara berjalan beriringan dan tidak saling membenarkan yang satu dan menyalahkan agama dan kearifan lokal yang lainnya. Moderasi tidak mempertentangkan melainkan mencari titik penyelesaian dengan toleran. Dalam konteks beragama, terjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kelompok ketika memahami teks agama. Kelompok yang satu terlalu menjunjung tinggi teks dan mengabaikan sama sekali kemampuan akal/nalar. Teks Kitab Suci dipahami lalu kemudian diwujudkan tanpa memahami konteks dari Kitab Suci tersebut. Beberapa kelompok menyebut sebagai golongan konservatif sedangkan yang lain disebut kelompok liberal, kelompok yang terlalu menjunjung tinggi akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri.

Moderat dalam pemikiran agama berarti mengutamakan sikap toleransi dalam perbedaan. Meyakini agama yang dianutnya sebagai yang paling benar, tidak berarti harus melecehkan agama orang lain. Perbedaan bukan penghalang untuk menjalin kerja sama, dengan asas kemanusiaan untuk membangun persaudaraan dan persatuan antaragama. Moderasi harus dimengerti dengan sungguh-sungguh dan ditumbuhkembangkan sebagai cita-cita bersama untuk menjaga keseimbangan dimana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya saling mendengarkan satu sama lain serta saling belajar mengelola dan mengatasi perbedaan di antara umat beragama. Dengan ini pemahaman tentang kebenaran tidak hanya akan dimiliki oleh satu kelompok saja, melainkan juga ada pada kelompok yang lain. Pemahaman ini tentunya harus berangkat dari sebuah keyakinan bahwa pada dasarnya kehadiran semua agama membawa ajaran tentang kebenaran dan keselamatan. Dari pemahaman itulah maka akan semakin jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dalam perbedaan dengan memiliki sikap tenggang rasa, yang menjadi warisan leluhur dalam mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita (Ibid, 37).

Seruan untuk selalu menggemakan moderasi, melalui perkataan menjadi sebuah tindakan kepedulian yang harus dimiliki seluruh umat manusia. Berbagai konflik dan ketegangan antarumat manusia dalam keragaman agama, suku, paham dan sebagainya telah melahirkan sebuah ketetapan internasional melalui Perserikatan Bangsa Bangsa yang menetapkan tahun 2019 ini sebagai “Tahun Moderasi Internasional” (*The International Year of Moderation*). Penetapan ini jelas sangat relevan dengan komitmen Kementerian Agama untuk terus menggemakan moderasi beragama di NKRI (Hidayat 2020).

Agama harus menjadi pedoman hidup dan solusi jalan tengah yang adil dalam menghadapi masalah hidup dan kemasyarakatan. Agama menjadi cara

pandang dan pedoman yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat, akal dan hati, rasio dan norma, idealisme dan fakta, individu dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan agama yaitu sebagai tuntunan hidup, memberi solusi atas berbagai persoalan dunia, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar, keluarga maupun negara (*Moderasi Beragama* 2019). Bagi bangsa Indonesia, keragaman harus diyakini sebagai kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Keragaman adalah pemberian Tuhan Yang Mencipta yang harus diterima sebagai sebuah karunia. Indonesia dengan segala keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama hampir tidak memilikiandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat Indonesia, terdapat pula ribuan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal.

Beragamnya masyarakat Indonesia akan memunculkan berbagai pandangan, keyakinan, dan kepentingan setiap warga masyarakat, termasuk dalam hal beragama. Bahasa persatuan Indonesia yaitu bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mempersatukan berbagai keragaman keyakinan sehingga segala bentuk perbedaan dapat dikomunikasikan dan dipahami oleh setiap orang. Kita harus bersyukur atas keragaman bangsa Indonesia yang dapat dipersatukan dengan bahasa yang satu meskipun gesekan akibat keliru mengelola keragaman itu tidak dapat dihindarkan. Hal ini diakibatkan karena selain agama dan kepercayaan yang beragam, dalam tiap-tiap agama juga terdapat keragaman penafsiran atas ajaran agama, khususnya berkaitan dengan menjalankan ritual agama. Biasanya, masing-masing penafsiran ajaran agama memiliki penganutnya sendiri yang meyakini kebenaran atas tafsiran yang dihidupinya.

Pemahaman atas keragaman itulah yang memungkinkan seorang pemeluk agama akan bisa mengambil jalan tengah (moderat) apabila satu pilihan kebenaran tafsir yang tersedia tidak memungkinkan untuk dijalankan. Sikap ekstrem biasanya timbul saat seorang pemeluk agama tidak mengetahui adanya pilihan terhadap kebenaran tafsir lain yang mungkin bisa ia tempuh. Dalam hal inilah moderasi beragama menjadi sangat penting sebagai cara pandang dalam beragama dimana era demokrasi yang serba terbuka, perbedaan pandangan dan kepentingan di antara warga negara yang sangat beragam telah diatur sedemikian rupa, agar semua harapan dan tujuan dapat tersalurkan sebagaimana mestinya. Demikian pula dalam beragama, konstitusi telah menjamin kemerdekaan umat beragama dalam memeluk dan mengamalkan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing (Latif 2015, 17).

Negara Indonesia menjadi contoh bagi bangsa-bangsa di dunia dalam hal mengelola keragaman budaya dan agama yang ada dan dianggap berhasil

memadukan dengan serasi cara beragama sekaligus bernegara. Ideologi Pancasila, menekankan terciptanya kerukunan antarumat beragama tersebut. Meskipun konflik sosial dalam skala kecil tetap terjadi, akan tetapi kita selalu mampu untuk keluar dari konflik dan kembali pada kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa besar yang dianugerahi keragaman oleh Sang Pencipta. Kita harus selalu waspada karena ancaman terbesar yang dapat memecah belah sebuah bangsa adalah konflik berlatar belakang agama, yang disertai dengan berbagai aksi kekerasan. Karena agama, memiliki sifat dasar keberpihakan yang penuh dengan muatan sensitivitas tinggi, sehingga hampir selalu melahirkan ikatan emosional pada pemeluknya. Bahkan bagi pemeluk fanatiknya, agama menjadi “benda” suci yang sakral dan keramat (Zainuddin 2020, 43). Fanatisme ekstrem terhadap sebuah kebenaran atas tafsir agama tidak sedikit pula menimbulkan permusuhan dan pertengkaran di antara umat beragama.

Konflik dengan mengatasnamakan agama dapat menimpa berbagai kelompok atau agama yang sama atau terjadi pada beragam kelompok dalam agama-agama yang berbeda (Zainuddin 2020, 2). Biasanya, konflik timbul karena disulut dengan berbagai latar perbedaan dalam agama untuk saling menyalahkan tafsir dan paham keagamaan, merasa benar sendiri, serta menutup diri pada tafsir dan pandangan keagamaan orang lain. Mengatasi situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam seperti ini, maka dibutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, dengan menampilkan moderasi beragama yang menghargai keragaman tafsiran sehingga tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan tindak kekerasan.

Semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dua kelompok ekstrem dalam beragama (Sermada 2021, 5). Di satu sisi, ada pemeluk agama ekstrem meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama dan menganggap penafsiran yang lain sebagai suatu kesesatan. Di sisi lain, ada pula yang ekstrem menjunjung tinggi akal sampai mengabaikan kesucian agama, mengorbankan keyakinan dasar ajaran agamanya demi menjunjung toleransi yang tidak sesuai pada tempatnya kepada umat agama lain. Mereka biasa disebut kelompok ekstrem liberal. Kedua kelompok inilah yang perlu dimoderasi sehingga memiliki pemahaman yang terbuka pada kebenaran yang ada dalam agama-agama lain.

#### **4. Moderasi Agama sebagai Sebuah Solusi Persatuan**

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “moderasi” berarti



menghindari kekerasan atau penghindaran keekstreman. Kata ini merupakan serapan dari kata “moderat”, yang berarti sikap untuk selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, dan memiliki kecenderungan ke arah jalan tengah. Sedangkan kata “moderator” berarti orang yang bertindak sebagai penengah (hakim, wasit, dan sebagainya), pemimpin sidang (rapat, diskusi) yang menjadi pengarah pada sebuah pembicaraan atau pendiskusan masalah. Ketika kata “moderasi” disejajarkan dengan kata “beragama”, menjadi “moderasi beragama”, maka istilah tersebut diartikan sebagai sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama. Penyatuan kedua kata itu mengarah pada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem (radikalisme) dengan berusaha mencari jalan tengah yang dapat menyatukan semua kelompok dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa (Zainuddin 2020, 130–131).

Sikap moderat dan moderasi adalah sikap dewasa yang baik dan sangat diperlukan dalam meminimalisir konflik akibat timbulnya perbedaan. Radikalisasi dan radikalisme, kekerasan dan kejahatan, termasuk ujaran kebencian/caci maki dan hoaks, terutama dengan mengatasnamakan agama, adalah sebuah upaya untuk memecah belah dan merusak kehidupan (Ibid, 142-143). Moderasi beragama adalah suatu usaha kreatif dalam mengem-bangkan sikap penerimaan terhadap keberagaman di tengah pelbagai desakan ketegangan, seperti antara klaim kebenaran absolut dan subjektivitas, penolakan yang arogan atas ajaran agama yang lain, juga antara radikalisme dan sekularisme. Toleransi adalah komitmen utama moderasi beragama yang digunakan sebagai cara terbaik dalam menghadapi radikalisme agama yang mengancam kehidupan beragama itu sendiri dan pada akhirnya mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Memperhatikan sikap keberagaman dalam dinamika berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengajak para tokoh agama dalam berbagai kesempatan untuk menjadikan agama sebagai sumber nilai-nilai yang merawat kebinekaan. Beliau juga mengajak para tokoh agama untuk menambah pengetahuan keagamaan umat masing-masing secara lebih mendalam dan lebih luas, karena sering terjadi kecenderungan yang bertumpu pada ajaran-ajaran yang disalahartikan sebagai akibat eksklusivisme, radikalisme, dan sentimen-sentimen agama. Tidak dapat sanggah bahwa agama menjadi roh utama bangsa ini. Oleh karena itu para tokoh agama memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kemajemukan sebagai kekayaan dan modal sosial Indonesia (Tapingku 2021).

Ide dasar moderasi yaitu untuk mencari persamaan dan bukan malah

memperuncing perbedaan. Alasan utama mengapa dibutuhkan moderasi beragama karena pada hakikatnya kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk untuk tidak menghilangkan nyawa orang lain yang berbeda keyakinan dengannya (Zainuddin 2020, 131). Agar dapat mencapai hal tersebut, maka agama harus selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Agama juga harus mengajarkan bahwa menjaga kehidupan manusia menjadi prioritas utama yang perlu diperhatikan; menghilangkan nyawa sesama berarti menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia. Moderasi beragama menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Tidak jarang orang yang ekstrem terhadap keyakinannya terjebak dalam praktik beragama dengan mengatasnamakan Tuhan hanya untuk membela keagungan-Nya tetapi mengenyampingkan aspek kemanusiaan. Orang yang beragama dengan cara ini bahkan rela merendahkan sesama manusia “atas nama Tuhan”, padahal menjaga martabat dan keluhuran manusia itu sendiri merupakan inti dari ajaran agama.

Sebagian penganut ajaran agama tertentu sering menggunakan ajaran agama untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya dan tidak jarang juga untuk melegitimasi hasrat politiknya. Aksi aksi eksploitatif atas nama agama ini pada akhirnya menyebabkan kehidupan beragama menjadi tidak seimbang, cenderung ekstrem dan berlebih-lebihan. Dalam hal ini, moderasi beragama menjadi sangat penting karena ia menjadi cara untuk mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan hakikatnya sehingga agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia bukan malah merusakkannya. Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan.

Sebagai bangsa yang memiliki banyak keragaman, para pendiri bangsa sudah sejak lama telah mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya (Ibid, 125-126). Indonesia ditetapkan bukan sebagai negara agama, akan tetapi agama juga tidak dipisahkan dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat-istiadat lokal, beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjalan beriringan dengan rukun dan damai. Hal itulah yang menjadi jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis, dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman.

Ekstremisme dan radikalisme dipastikan dapat merusak sendi-sendi keindonesiaan apabila terus dibiarkan tumbuh berkembang (Sermada 2021, 137–138). Dari sebab itu, moderasi beragama sangat relevan dijadikan sebagai

sebuah cara pandang. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kebaikan moral bersama yang relevan tidak saja dengan perilaku individu, melainkan juga dengan komunitas atau lembaga. Moderasi sudah sejak lama menjadi aspek yang menonjol dalam sejarah peradaban dan tradisi semua agama di dunia. Setiap agama memiliki sikap yang ideal dan kecenderungan ajaran yang mengarah pada satu titik makna yang sama yaitu dengan memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrem dan tidak berlebih-lebihan.

Kesamaan nilai moderasi ini pula yang mendorong terjadinya pertemuan bersejarah dua tokoh agama besar dunia, Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al Azhar, Syekh Ahmad el-Tayyeb, pada 4 Februari 2019 lalu. Pertemuan tersebut menghasilkan dokumen persaudaraan kemanusiaan (*human fraternity document*), yang di antara pesan utamanya menegaskan bahwa musuh bersama umat beragama saat ini sesungguhnya adalah ekstremisme akut (*fanatic extremism*), hasrat saling memusnahkan, perang, intoleransi, serta rasa benci di antara sesama umat manusia, yang semuanya mengatasnamakan agama (Gandhi 2016).

Sebagai negara yang plural dan multikultural, pertikaian berlatar agama sangat potensial terjadi di Indonesia (Zainuddin 2020, 128). Moderasi beragama dibutuhkan sebagai solusi, untuk dapat menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan. Tidak sedikit pula masyarakat memiliki anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki pendirian yang teguh, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan ajaran agamanya. Moderat disalahpahami sebagai upaya kesepakatan teologis beragama dengan pemeluk agama lain.

Orang yang moderat seringkali dianggap belum sepenuhnya mengerti tentang agama yang diyakininya, karena dianggap tidak menjadikan keseluruhan ajaran agama sebagai jalan hidup, serta tidak menjadikan perbuatan pemimpin agamanya sebagai teladan dalam seluruh lapisan kehidupan. Umat beragama yang moderat juga sering dicap tidak memiliki kepekaan perasaan, tidak memiliki kepedulian, dan tidak memberikan pembelaan ketika, misalnya, simbol-simbol agamanya direndahkan. Anggapan salah berikutnya yang sering berkembang di dalam masyarakat adalah bahwa berpihak pada nilai-nilai moderasi dan toleransi dalam beragama sama artinya dengan bersikap bebas dan tidak menghiraukan norma-norma dasar yang sudah jelas tertulis dalam teks-teks keagamaan, sehingga dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, mereka yang beragama secara moderat sering dihadapkan dengan umat yang memelihara tradisi dan berpegang teguh pada ajaran agamanya (Zainuddin 2020, 128).

Kesalahpahaman terkait makna moderat dalam beragama ini berakibat pada munculnya sikap penolakan masyarakat yang tidak ingin dikatakan sebagai seorang moderat. Moderat dalam beragama tidak berarti menyepakati jalan damai pada prinsip-prinsip dasar atau ritual pokok agama untuk menyenangkan orang lain yang berbeda paham keagamaannya, atau berbeda agamanya. Moderasi beragama bukan pula sebagai pembenaran bagi seseorang untuk tidak mengamalkan ajaran agamanya dengan serius. Justru, moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang diyakininya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tetapi berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama.

## **5. Sikap Gereja Katolik Dalam Mendukung Moderasi Beragama**

Gereja Katolik menghormati agama dan keyakinan yang berbeda (Riyanto, *Dialog Interreligius*, 444). Hal ini selaras dengan pendapat Gereja Katolik dalam pernyataan dan sikap yang dituangkan dokumen Konsili Vatikan II, khususnya pada *Gaudium et Spes* art. 75 bahwa: “Gereja Katolik tidak menolak apa pun, yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat dan tulus, Gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah, serta ajaran-ajaran, yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang”. Lebih lanjut Gereja Katolik mengungkapkan secara khusus kepada umat Muslim melalui pernyataannya “Gereja juga menghargai umat Islam, yang menyembah Allah satu-satunya. Memang mereka tidak mengakui Yesus sebagai Allah, melainkan menghormati-Nya sebagai Nabi” (*Nostra Aetate* art. 3).

Gereja Katolik sungguh menghargai agama dan kepercayaan lainnya. Gereja tidak melebih-lebihkan dirinya sebagai agamanya yang paling benar, justru Gereja mengakui keberadaan agama lain. Gereja menghormati dan mengembangkan kebebasan, tanggung jawab dan terlibat dalam mewujudkan *bonum commune* dalam masyarakat (Yuda 2021). Dalam mewujudkan komitmennya, Gereja memandang perlu kerja sama dengan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini diungkapkan Gereja melalui sikapnya: “Hendaknya semua warga negara menyadari hak maupun kewajibannya untuk secara bebas menggunakan hak suara mereka guna meningkatkan kesejahteraan umum” (*Gaudium et Spes* art. 75). Gereja terus mendorong agar umat Kristiani terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial terutama dalam bidang-bidang keluarga, kebudayaan, kerja, ekonomi dan politik sesuai dengan kemampuannya untuk kesejahteraan umum.

Moderasi beragama oleh Gereja Katolik memegang teguh pada prinsip utama bahwa “Setiap pribadi manusia, entah dari suku dan ras atau pengelompokan manapun, mempunyai martabat hidup yang tidak dapat diganggu gugat” (*Pacem in Terris* tentang Membangun Perdamaian: Menghormati Kelompok Minoritas art. 3). Dengan tegas, “Gereja menolak setiap diskriminasi atau penindasan terhadap manusia karena alasan ras atau warna, status, atau agama karena bertentangan dengan semangat Kristus” (*Nostra Aetate* art. 85). Moderasi beragama dimengerti sebagai suatu sikap yang berimbang, baik dalam pengamalan agama itu sendiri maupun penghormatan kepada praktik agama orang lain yang berbeda keyakinan. Gereja Katolik secara tegas menolak praktik politisasi SARA dalam kompetisi politik di Indonesia, baik Pilkada, Pileg, maupun Pilpres. Demikian juga umat Katolik wajib mengatakan tidak pada praktik politisasi SARA sebagai wujud kecintaan sebagai warga Gereja maupun sebagai warga negara Indonesia yang meyakini empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Untuk itulah Gereja Katolik berpartisipasi dalam mempertahankan kesatuan Republik Indonesia dengan turut menguatkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Gereja Katolik menegaskan bahwa mencintai Tanah Air berarti ikut mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta memperjuangkan keutuhan NKRI, seperti yang telah diperjuangkan oleh para tokoh Katolik (Yuda 2021).

Umat Katolik Indonesia juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Gereja Katolik Indonesia sebagai bentuk dukung moderasi beragama, melalui Konferensi Waligereja Indonesia, Keuskupan dan Paroki-paroki sampai ke tingkat lingkungan/wilayah terkecil mengadakan seminar atau katekese/pendalaman iman dengan mengusung tema-tema tertentu. Gereja menentukan tema-tema yang berkaitan dengan persatuan dengan tujuan untuk menyadarkan umat Katolik bagaimana memahami ajaran-ajaran Gereja Katolik, cara bersikap, berperilaku dan bertindak sesuai ajaran agama yang dianutnya sehingga menjadi umat beragama Katolik yang moderat.

Dalam mewujudkan keluhuran martabat manusia, Gereja sangat mengecam tindakan radikalisme, terorisme, intoleransi terhadap mereka yang berbeda keyakinan, serta politik yang menggunakan SARA yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap terbuka Gereja Katolik didasari ketulusan untuk saling mengenal dan membangun pengertian timbal-balik antarumat beragama. Melalui sikap terbuka untuk dialog ini diharapkan mampu meruntuhkan tembok pemisah dan membangun jembatan persahabatan dan persaudaraan. Gereja Katolik mengajak seluruh umat beriman untuk mengembangkan serta melaksanakan berbagai gerakan persaudaraan manusia, agar terciptanya perubahan yang lebih baik untuk bangsa Indonesia. Gereja

terus berupaya untuk menjadi ujung tombak dalam pengutan moderasi beragama melalui komunitas umat beriman, dengan menjadikan umat Katolik yang memiliki komitmen kuat untuk beresikap moderat, toleran, dan menghargai martabat setiap pribadi manusia.

## 6. Simpulan

Agama menjadi pegangan hidup dan solusi jalan tengah yang adil dalam menghadapi masalah hidup dan kemasyarakatan. Agama merupakan cara pandang dan pedoman yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat, akal dan hati, rasio dan norma, idealisme dan fakta, individu dan masyarakat. Selain menjadi tugas pemerintah, para tokoh agama dan akademisi, baik individu maupun kelompok, juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk terlibat menjaga ketertiban dan keberlangsungan kehidupan agama-agama di Indonesia. Setiap umat beragama harus menaruh perhatian khusus berkaitan dengan pola interaksi antar pemeluk agama dalam upaya mewujudkan kehidupan yang harmonis antar anak bangsa. Dari sebab itu, ada beberapa langkah strategis yang mesti dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, antara lain:

*Pertama*, moderasi beragama harus didukung oleh seluruh warga-bangsa dalam menjamin kebebasan beribadah dan berekspresi bagi pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Hal ini ditampakkan melalui pengakuan terhadap berbagai bentuk keyakinan agama-agama dan juga berbagai macam agama lokal/pribumi yang memiliki warisan budayanya masing-masing. Yang lebih penting lagi adalah, tidak adanya diskriminasi terhadap beberapa agama atau keyakinan yang secara jumlah sebagai minoritas.

*Kedua*, moderasi sosial menjamin serta melindungi kehidupan bersama yang harmonis antarpemeluk agama dengan menciptakan ruang-ruang bersama yang memungkinkan interaksi sehat dan dialog yang produktif antar sesama umat beragama. Kebijakan ini harus didasarkan pada upaya untuk menciptakan *bonum comune* bagi masyarakat yang memungkinkan adanya interaksi dan pertukaran sosial antarkelompok yang berbeda secara ideologis dan paham yang memungkinkan munculnya sikap toleran. Setiap orang memiliki peran menjaga keseimbangan kekuatan antarkelompok untuk menjamin kedamaian dan tertib sosial. Dengan begitu, umat beragama yang moderat dapat menjadi “jembatan emas” antara sesama umat beragama sehingga hak-hak dan kewajiban individu dan kelompok apapun dapat dilindungi dan dapat hidup berdampingan secara damai serta menumbuhkan kepedulian akan harkat kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- D, Lio Z. dkk. 2020. "Tantangan Dan Strategi Pelayanan Diakonia Karitatif." *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral* 4 (1).
- Gandhi, Grace. 2016. "Paus Fransiskus Sambut Imam Besar Tayeb Dengan Pelukan." *Tempo.Co.* 2016. <https://dunia.tempo.co/read/773677/paus-fransiskus-sambut-imam-besar-tayeb-dengan-pelukan>.
- Hariyanto, Nazar Naamy dan Ishak. 2021. "Moderasi Beragama Di Ruang Publik Dalam Bayang-Bayang Radikalisme." *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* Vol. 3 No. 2.
- Haryani, Elma. 2020. "Pendidikan Moderasi Beragama Untuk Generasi Milenial: Studi Kasus 'Lone Wolf' Pada Anak Di Medan." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 18 (2).
- Hidayat, Feriawan. 2020. "Kesadaran Moderasi Dibutuhkan Dalam Kehidupan Berbangsa." *Berita satu.* 2020. <https://www.beritasatu.com/nasional/710997/kesadaran-moderasi-dibutuhkan-dalam-kehidupan-berbangsa>.
- Latif, Y. 2015. *Bhinneka Tunggal Ika: Suatu Konsepsi Dialog Keragaman Budaya, Dalam Fikih Kebhinekaan: Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewargaan, Dan Kepemimpinan Non-Muslim.* Jakarta: Maarif Institut.
- Moderasi Beragama.* 2019. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.
- Riyanto, Armada. 2010. *Dialog Interreligi.* Yogyakarta: Kanisius.
- Riyanto, Armada dkk. 2018. *Kearifan Lokal-Pancasila.* Yogyakarta: Kanisius.
- Sermada, Donatus. 2021. *Pengantar Ilmu Perbandingan Agama.* Malang: Pusat Publikasi Filsafat Teologi Widya Sasana.
- Tapingku, Joni. 2021. "Moderasi Beragama Sebagai Perekat Dan Pemersatu Bangsa." *Www.Iainpare.Ac.Id.* 2021. <https://www.iainpare.ac.id/moderasi-beragama-sebagai-perekat/>.
- Yuda, Darung Afrianus dan Yohanes. 2021. "Keterlibatan Gereja Katolik Mendukung Moderasi Beragama Berorientasi Pada Komitmen Kebangsaan." *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral* 5 No. 2.
- Zainuddin, Prof. Dr. M. M.A. 2020. *Moderasi Beragama Di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstremisme.* Malang: UB Press.

